

## TRANSFER KE DAERAH – PENGELOLAAN

2023

PP NO. 37, LN 2023 /NO. 100 THN 2023 , 57 HLM.

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH

- ABSTRAK** : - Sesuai amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai mekanisme perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Transfer ke Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 1 Tahun 2022
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pengelolaan transfer ke daerah dengan menetapkan batasan istilah dan pengertian yang digunakan. Diatur tentang dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang meliputi pengalokasian. Dana alokasi khusus yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, persiapan pelaksanaan dana alokasi khusus fisik. Dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dana desa yang meliputi perencanaan dan penganggaran, serta pengalokasian. Transfer ke daerah untuk daerah persiapan, transfer ke daerah untuk daerah baru, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan.
- CATATAN** : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2023.
- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, dan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak berlaku.
  - Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
  - Penjelasan : 32 hlm